SOCILEXIA
Journal of Social Sciences and Humanities

SOCILEXIA: Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 1, No. 3, 2026
E-ISSN: 3164-9610
punggawajournal.com/socilexia

Monarki Absolut dan Demokrasi: Apakah Sistem Pemerintahan Menentukan Keberhasilan Ekonomi? Studi Komparatif Arab Saudi dan Indonesia

Raissa Nadhira Putri Zhafira[1], Nazwa Alya[2], Silvia Maharani[3], Dwiki Oktavia Ramadhani[4], Syahrul Raindie Yudista[5]
[1,2,3,4,5] Program Studi Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia
Korespondensi: 253507111047@student.unsil.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 12th, 2026
Revised Oct 9th, 2026
Accepted Oct 25th, 2026

Keyword:
Monarki Absolut; Demokrasi; Keberhasilan Ekonomi; Negara Rentier; Studi Komparatif; Arab Saudi; Indonesia.

ABSTRAK

Perdebatan tentang apakah sistem pemerintahan menentukan keberhasilan ekonomi belum menghasilkan jawaban yang tunggal. Penelitian ini membandingkan monarki absolut Arab Saudi dan demokrasi Indonesia untuk menilai sejauh mana sistem pemerintahan menentukan keberhasilan ekonomi. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif dengan metode studi komparatif, pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, serta analisis deskriptif-komparatif dengan pendekatan rasional sebagai kerangka pembahasan utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa monarki absolut Arab Saudi memungkinkan keputusan ekonomi yang terpusat dan cepat serta ditopang rente minyak, tetapi menyisakan kerentanan berupa ketergantungan pada komoditas tunggal dan lemahnya akuntabilitas. Demokrasi Indonesia memberi legitimasi politik dan stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga, tetapi kebijakan ekonominya kerap terhambat biaya kompromi politik, korupsi, dan kuatnya kepentingan oligarkis. Dengan demikian, sistem pemerintahan bukan penentu tunggal keberhasilan ekonomi: ia membentuk insentif dan cara ekonomi dikelola, sedangkan kualitas institusi, insentif elite, dan karakter sumber daya alam turut berperan. Penelitian ini mengisi celah literatur dengan menyatukan kajian demokrasi dan ekonomi di Indonesia, kajian monarki Arab Saudi, dan logika pilihan rasional dalam satu perbandingan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Apakah sistem pemerintahan menentukan keberhasilan ekonomi merupakan salah satu perdebatan tertua dalam ilmu politik dan ekonomi pembangunan. Teori modernisasi berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong demokratisasi dan bahwa negara demokratis pada akhirnya lebih makmur (Lipset, 1959). Pandangan yang berbeda menyatakan bahwa pemerintahan yang terpusat dapat mengambil keputusan lebih cepat dan konsisten sehingga mempercepat pembangunan. Hikmah (2013)mencatat bahwa pemikiran semacam itu populer di negara berkembang pada tahun-tahun awal setelah Perang Dunia II, ketika pembangunan dianggap membutuhkan pemerintah yang "kuat". Acemoglu dan Acemoglu & Robinson (2012) menawarkan penjelasan institusional: kemakmuran jangka panjang bergantung pada inklusif atau ekstraktifnya institusi politik dan ekonomi, bukan semata-mata pada label demokrasi atau otoritarianisme.

Bukti empiris pun tidak seragam. Przeworski et al. (2000)menemukan bahwa rezim politik tidak secara otomatis menentukan laju pertumbuhan, (Gerring et al., 2005) menunjukkan bahwa dampak positif demokrasi lebih terlihat sebagai akumulasi pengalaman demokrasi jangka panjang, dan (Mulligan et al., 2004) menemukan bahwa perbedaan kebijakan publik antara demokrasi dan non-demokrasi lebih kecil daripada yang sering diperkirakan. (Hikmah, 2013) menyimpulkan hal senada,

yaitu demokrasi hanya membawa kemajuan ekonomi apabila ditopang kebijakan ekonomi yang tepat. India, misalnya, baru bergerak setelah menjalankan pembaruan kebijakan dan membuka perekonomiannya.

Arab Saudi dan Indonesia menyediakan kasus komparatif yang menarik. Arab Saudi adalah monarki absolut: raja menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, partai politik tidak diizinkan, dan Al-Qur'an serta Sunnah berfungsi sebagai konstitusi (Nadia, 2020). Perekonomiannya bertumpu pada rente hidrokarbon, dengan sekitar 72% penerimaan negara pada 2015 berasal dari minyak (Dzarivauri, 2023), dan negara ini dikenal sebagai contoh klasik negara rentier (Beblawi & Luciani, 1987; Hertog, 2010). Anjloknya harga minyak sejak 2014 mendorong pemerintah mengumumkan *Saudi Vision 2030* pada 25 April 2016 untuk mengurangi ketergantungan tersebut (Al Naimi, 2022; Dzarivauri, 2023; (Kingdom of Saudi Arabia, 2016)). Indonesia, sebaliknya, memasuki era demokrasi setelah Reformasi 1998, dengan amandemen UUD 1945 pada 1999–2002 dan pemilihan presiden langsung sejak 2004; konstitusinya menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Noviati, 2013). Keduanya sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim, menjadi anggota G20, dan memiliki visi pembangunan jangka panjang: *Saudi Vision 2030* (Kingdom of Saudi Arabia, 2016) serta Visi Indonesia Emas 2045 yang dituangkan dalam RPJPN 2025–2045 (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024).

Literatur yang dihimpun dikelompokkan menjadi lima berdasarkan fokus kajiannya, lalu masing-masing ditelaah temuan dan keterbatasannya terhadap pertanyaan penelitian ini. Kelompok pertama menguji hubungan demokrasi dan ekonomi di Indonesia, dan hasilnya belum seragam. Purba & Hariyadi, (2023) menemukan bahwa aspek lembaga demokrasi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebebasan sipil dan hak politik tidak, dengan koefisien determinasi hanya 7,19%. Novanto & Prabowo, (2024) pada periode 2015–2020 memperoleh pengaruh positif dari lembaga demokrasi tetapi pengaruh negatif dari kebebasan sipil. Abdilah & Riyanto, (2025) menemukan bahwa indeks demokrasi berpengaruh negatif pada 2015–2020 dan positif pada 2021–2023, setelah BPS mengubah metode pengukurannya. Trinugroho et al. (2023), dengan data 34 provinsi, bahkan menemukan bahwa demokrasi yang lebih tinggi berasosiasi dengan pertumbuhan regional yang lebih rendah, yang oleh penulisnya dikaitkan dengan mahalnya biaya penyelenggaraan demokrasi, tetapi juga dengan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah. Di tingkat nasional, Azwar & Subekan, (2022) memakai data 1995-2020 dan menemukan bahwa demokrasi menurunkan korupsi hanya dalam jangka panjang, sementara Yunan et al. (2025) menunjukkan bahwa korupsi menekan pertumbuhan ekonomi regional pada semua spesifikasi model yang diuji. Melalui tinjauan literatur dan dokumen kebijakan, Afriati et al. (2025) menyimpulkan bahwa demokrasi berkontribusi positif lewat keterbukaan pemerintahan, penegakan hukum, dan partisipasi UMKM, meskipun korupsi dan inefisiensi birokrasi membatasinya. Dalam kerangka demokrasi ekonomi, Mas'ud et al. (2022) melaporkan bahwa demokrasi produksi, demokrasi kepemilikan faktor produksi, serta demokrasi alokasi dan konsumsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan, baik di daerah penghasil maupun bukan penghasil sumber daya alam, sedangkan derajat penghisapan ekonomi berpengaruh negatif. Iskandar et al. (2024) dan Abbas & Manan, (2005)melengkapi gambaran ini dari sisi tata negara dan keselarasan sistem politik dengan sistem ekonomi.

Keragaman temuan itu menunjukkan bahwa hasil sangat bergantung pada cara mengukur demokrasi dan periode data. Bila dibaca berdampingan, temuan Azwar & Subekan, (2022) serta Yunan et al. (2025) dapat dipandang sebagai petunjuk bahwa korupsi menjadi salah satu saluran yang menghubungkan kualitas demokrasi dengan hasil ekonomi, tetapi jalur itu belum diuji dalam satu kerangka. Keterbatasan yang lebih mendasar adalah bahwa sebagian besar studi ini membandingkan variasi kualitas demokrasi antarprovinsi atau antarwaktu dalam satu negara demokratis, sehingga tidak dapat menunjukkan apakah sistem pemerintahan itu sendiri, dibandingkan dengan sistem yang berbeda, menentukan keberhasilan ekonomi.

Kelompok kedua mengkaji Arab Saudi dan memperlihatkan dua kecenderungan. Kajian ekonomi menelaah diversifikasi. Dzarivauri, (2023) menguraikan latar dan implikasi ekonomi *Saudi Vision 2030*; Al Naimi, (2022) menyimpulkan bahwa upaya diversifikasi itu terhambat harga minyak yang fluktuatif, defisit anggaran, dan sistem pendidikan yang masih tradisional; Ben Hassen, (2022) menilai bahwa pandemi dan jatuhnya harga minyak mempercepat diversifikasi di negara-negara Teluk, dengan stabilitas politik dan sumber daya keuangan yang besar sebagai modal, tetapi faktor struktural, fungsional, dan budaya masih menghambat peralihan ke ekonomi berbasis pengetahuan; dan Neffati &

Jbir, (2024), dengan data 1990–2021, menemukan hubungan jangka panjang antara pertumbuhan, diversifikasi, dan digitalisasi, yakni digitalisasi mendorong pertumbuhan sektor nonmigas. Mustun, (2022) menemukan bahwa rente minyak berpengaruh positif terhadap pembangunan berkelanjutan Arab Saudi pada 1998–2019, sedangkan skor tata kelola berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan.

Kecenderungan kedua adalah kajian kekuasaan: Nadia, (2020) menguraikan struktur kekuasaan monarki; Montambault Trudelle, (2023), Ożarowski, (2022), serta Aftab & Abbasi, (2026) menelaah konsolidasi kekuasaan pada masa Raja Salman dan Muhammad bin Salman; sedangkan Hernández Martínez, (2020) memetakan aktor dan lembaga dalam distribusi kekuasaan serta faktor internal yang menopang dominasi dinasti Saud. Dalam literatur yang dihimpun, kedua kecenderungan ini berjalan terpisah: kajian ekonomi memperlakukan sistem politik sebagai latar, sedangkan kajian kekuasaan, termasuk yang menyentuh pengelolaan dana kekayaan negara, belum membandingkannya dengan negara demokratis.

Kelompok ketiga menyoroti hubungan kedua negara, yaitu motif investasi Saudi di sektor UKM Indonesia (Salim, 2022) dan dampak kenaikan tarif bea masuk Saudi terhadap ekspor Indonesia (Ningsih & Nisaa, 2021). Keduanya berfokus pada investasi dan perdagangan, bukan pada perbandingan sistem pemerintahan.

Kelompok keempat adalah kajian teoretis dan lintas negara tentang rezim dan kinerja ekonomi. Lipset, (1959)mengaitkan kemakmuran dengan demokrasi, sedangkan Przeworski et al. (2000), Gerring et al. (2005), dan Mulligan et al. (2004) menunjukkan bahwa dampak rezim terhadap pertumbuhan dan kebijakan tidak otomatis. Telaah yang lebih baru memperkuat kesan itu. Gerring et al. (2022) meninjau sekitar 1.100 analisis lintas negara dari 600 artikel dan menemukan bahwa sebagian besar studi melaporkan hubungan positif atau nol dengan demokrasi, disertai indikasi bias ambang yang dapat membuat manfaat demokrasi tampak berlebih. Paldam, (2024) menunjukkan bahwa teori yang menempatkan pendapatan sebagai penyebab demokratisasi dapat menjelaskan lemahnya hubungan demokrasi dan pertumbuhan sebagai hubungan semu, tetapi tidak sebaliknya. Krieger, (2022), dengan data panel 150 negara selama 1920–2019, menemukan bahwa demokrasi dapat memperbaiki kualitas institusi ekonomi dan bahwa kualitas institusi lebih beragam di antara otokrasi daripada di antara demokrasi. Di sisi rente, Walker, (2023) mencatat bahwa teori negara rentier telah banyak dimodifikasi dan kini memperhitungkan perilaku negara yang lebih adaptif dan strategis. Kelompok ini memberi landasan yang kuat, tetapi bersifat lintas negara sehingga tidak menjelaskan bagaimana mekanisme keputusan ekonomi bekerja pada kasus tertentu.

Kelompok kelima adalah kajian komparatif tipe rezim, misalnya Berg-Schlosser & Hoffmann-Lange, (2023) yang membandingkan Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura, yakni empat kasus dengan latar sejarah dan budaya yang mirip tetapi tipe rezim berbeda, dari segi kualitas demokrasi, tata kelola, dan pembangunan sosial-ekonomi. Desain komparatif itu sejalan dengan logika penelitian ini, tetapi kasusnya terbatas di Asia Timur dan tidak mencakup monarki absolut maupun negara rentier.

Berdasarkan pemetaan tersebut, setidaknya tiga celah dapat dirumuskan. Pertama, celah komparatif: kajian yang menyandingkan monarki absolut Arab Saudi dan demokrasi Indonesia dalam kaitannya dengan keberhasilan ekonomi belum ditemukan dalam literatur yang dihimpun. Kajian tentang Indonesia membandingkan variasi dalam satu rezim, kajian tentang Arab Saudi bersifat deskriptif atau berfokus pada diversifikasi tanpa pembanding demokratis, dan kajian hubungan keduanya berfokus pada investasi dan perdagangan. Kedua, celah analitis: studi kuantitatif cenderung menguji hubungan agregat sehingga mekanisme pengambilan keputusan ekonomi dan insentif penguasa tidak terlihat, sementara rente sumber daya jarang dikendalikan secara eksplisit saat membandingkan rezim. Hal ini penting karena Indonesia pun kaya sumber daya, dan kajian hilirisasi nikel memperlihatkan dilema antara industrialisasi dan risiko lingkungan serta ketergantungan teknologi di negara demokratis (Kusuma et al., 2025; Muhyiddin, 2026). Ketiga, celah teoretis: logika pilihan rasional baru dipakai Dzarivauri, (2023) untuk menjelaskan keputusan reformasi Muhammad bin Salman, dan itu pun tanpa negara pembanding. Temuan Krieger, (2022) bahwa kualitas institusi lebih beragam di antara otokrasi menunjukkan bahwa label rezim saja tidak cukup, sehingga insentif elite perlu dibaca pada setiap kasus. Atas dasar ketiga celah itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui tiga hal. Pertama, menganalisis mekanisme pengambilan keputusan ekonomi, bukan hanya hasil agregat. Kedua, memasukkan rente sumber daya sebagai variabel pembanding agar pengaruh sistem pemerintahan tidak dicampuradukkan dengan pengaruh minyak; hal ini relevan karena Indonesia juga

kaya sumber daya alam seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit. Ketiga, memakai pendekatan rasional untuk menjelaskan insentif elite penguasa di kedua sistem.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan utama penelitian ini adalah apakah sistem pemerintahan menentukan keberhasilan ekonomi. Pertanyaan itu dijabarkan menjadi tiga pertanyaan turunan: (1) bagaimana karakteristik sistem monarki absolut Arab Saudi dan demokrasi Indonesia dalam kaitannya dengan pengelolaan ekonomi; (2) bagaimana perbandingan tingkat keberhasilan ekonomi kedua negara berdasarkan indikator yang ditetapkan; dan (3) sejauh mana sistem pemerintahan menjelaskan perbedaan keberhasilan tersebut dibandingkan faktor non-politik, khususnya rente sumber daya alam. Tujuannya adalah mendeskripsikan dan membandingkan ketiga aspek itu secara sistematis serta menyusun proposisi analitis yang dapat diuji pada penelitian lanjutan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian perbandingan politik-ekonomi; secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan refleksi bagi perumusan kebijakan ekonomi yang selaras dengan karakter institusi masing-masing negara.

Monarki absolut adalah sistem ketika kekuasaan politik tertinggi terpusat pada raja dan keluarga kerajaan tanpa pembatasan konstitusional yang efektif oleh lembaga perwakilan pilihan rakyat. Demokrasi, dalam pengertian prosedural, ditandai oleh pemilu yang kompetitif dan berkala, kebebasan sipil, serta pembagian dan pembatasan kekuasaan oleh lembaga yang saling mengawasi. Kedua kategori ini adalah tipe ideal. Noviati, (2013) mencatat bahwa belum ada ukuran baku untuk menyatakan satu sistem pemerintahan lebih demokratis daripada yang lain. Kualitas demokrasi Indonesia sendiri masih diperdebatkan: Aspinall & Mietzner, (2010) mengidentifikasi berbagai masalah konsolidasi demokrasi, dan Power, (2018) menyoroti kecenderungan kemunduran demokrasi pada masa pemerintahan Joko Widodo sampai 2018. Sementara itu, monarki Arab Saudi memiliki lembaga konsultatif dan program reformasi ekonomi-sosial yang tidak dapat disederhanakan sebagai stagnasi politik (Nadia, 2020; Dzarivauri, 2023).

Pendekatan rasional (*rational choice*) memandang aktor politik, baik penguasa maupun warga, sebagai pihak yang bertindak memaksimalkan tujuannya di bawah batasan institusi. Penelitian ini memakainya untuk menjawab satu pertanyaan inti: insentif apa yang dihadapi penguasa di masing-masing sistem ketika memutuskan kebijakan ekonomi? Pada demokrasi, penguasa menghadapi disiplin elektoral, pengawasan lembaga lain, dan kebutuhan membangun koalisi. Pada monarki absolut, kendala institusionalnya lebih ringan, tetapi penguasa bergantung pada kesetiaan elite internal dan kemampuan membiayai kontrak sosial. Kerangka institusional Acemoglu & Robinson, (2012) melengkapinya dengan membedakan institusi inklusif dan ekstraktif sebagai penentu insentif jangka panjang.

Konsep negara rentier dikembangkan oleh Mahdavy, (1970) dan dielaborasi Beblawi dan Beblawi & Luciani, (1987) untuk negara yang sebagian besar pendapatannya berasal dari rente eksternal seperti minyak, bukan dari pajak atas aktivitas produktif warga. Ketika negara tidak bergantung pada pajak, tuntutan akuntabilitas cenderung melemah dan loyalitas dibeli melalui subsidi, lapangan kerja sektor publik, dan layanan gratis. Ross, (2001) menunjukkan bahwa ketergantungan pada minyak berkaitan dengan hambatan demokratisasi, Sachs & Warner, (1995) menemukan bahwa negara dengan kelimpahan sumber daya tinggi cenderung tumbuh lebih lambat (temuan yang diperdebatkan luas), dan Hertog, (2010) memperlihatkan bagaimana kekayaan minyak membentuk birokrasi dan pola patronase di Arab Saudi.

Keberhasilan ekonomi dalam penelitian ini dipahami secara multidimensi, tidak sebatas besarnya PDB, dan diukur dengan indikator yang sama untuk kedua negara, yaitu (1) tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi; (2) struktur dan diversifikasi ekonomi; (3) pembangunan manusia; (4) ketimpangan; (5) kualitas tata kelola, termasuk persepsi korupsi (Kaufmann et al., 2010); dan (6) stabilitas dan disiplin kebijakan makroekonomi serta kesinambungan strategi pembangunan jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami dan menafsirkan fenomena politik-ekonomi secara mendalam, bukan menguji hubungan statistik (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019). Metodenya adalah studi komparatif, yaitu membandingkan dua kasus secara sistematis untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan pola yang dapat dijelaskan (Lijphart, 1971). Desain dua kasus dipilih karena sistem pemerintahan kedua negara kontras, sementara keduanya sama-sama anggota G20 dan berpenduduk mayoritas Muslim sehingga sebagian variasi sosial-budaya relatif

terkendali. Objek perbandingan adalah sistem monarki absolut Arab Saudi dan sistem demokrasi Indonesia, dengan fokus pada keterkaitannya dengan pengelolaan dan keberhasilan ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam indikator pada bagian pendahuluan.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*literature review*) dan dokumentasi. Sumber data sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan (Basic Law of Governance, 1992), laporan resmi lembaga internasional (Bank Dunia, UNDP, Freedom House, *Economist Intelligence Unit*, dan Transparency International), serta data statistik terkait. Artikel jurnal dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan tema, yaitu kajian demokrasi dan ekonomi Indonesia, kajian sistem pemerintahan dan ekonomi Arab Saudi, serta kajian hubungan kedua negara. Angka indeks yang dipakai adalah edisi yang dapat diverifikasi penulis (EIU edisi 2024, Freedom House 2025, CPI 2025, dan HDR 2025).

Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif mengikuti tahapan Miles et al. (2014), yaitu (1) kondensasi data, yakni memilah dan merangkum data sesuai indikator; (2) penyajian data dalam uraian dan tabel perbandingan; dan (3) penarikan serta verifikasi kesimpulan. Pendekatan rasional dipakai sebagai kerangka tafsir utama dengan menelaah insentif penguasa dan konsekuensinya bagi kebijakan ekonomi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari literatur akademik, dokumen resmi, dan data statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 merangkum perbedaan mendasar kedua sistem. Di Arab Saudi, kekuasaan eksekutif terkonsentrasi pada raja dan keluarga kerajaan. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memang ada, tetapi tidak ada pemisahan kekuasaan dan keputusan akhir bergantung pada raja (Hernández Martínez, 2020); menteri dan gubernur provinsi ditunjuk raja, dan Majelis Syura yang beranggotakan 150 orang hanya menasihati raja serta dewan menteri (Nadia, 2020). Partai politik tidak diizinkan dan pemilu nasional tidak diselenggarakan. Di Indonesia, kekuasaan dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan pemilu langsung, sistem multipartai, serta lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedudukan KPK berubah setelah revisi undang-undangnya pada 2019: lembaga ini ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pegawainya berstatus aparatur sipil negara, dan tindakan penyadapan memerlukan izin dewan pengawas (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019); Mochtar, (2021) menilai perubahan itu melemahkan independensi KPK terhadap eksekutif. Sistem presidensial Indonesia berlandaskan asas kedaulatan rakyat (Noviati, 2013), dan menurut Iskandar et al., (2024) pemisahan kekuasaan serta desentralisasi menjadi penopang stabilitas politik dan ekonomi.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Sistem Pemerintahan

Aspek	Arab Saudi	Indonesia
Bentuk pemerintahan	Monarki absolut; raja sebagai kepala negara dan pemerintahan (sejak 2022 putra mahkota menjabat perdana menteri)	Republik presidensial; presiden dipilih langsung sejak 2004
Dasar hukum	*(Basic Law of Governance, 1992);* Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi	(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)(diamandemen 1999–2002)
Lembaga legislatif	Majelis Syura, 150 anggota ditunjuk raja, fungsi konsultatif	DPR dan DPD dipilih melalui pemilu; fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
Partai dan pemilu	Partai politik tidak diizinkan; tidak ada pemilu nasional (pemilu dewan kota yang terbatas pernah diselenggarakan)	Sistem multipartai; pemilu langsung berkala
Pembagian kekuasaan	Terkonsentrasi pada keluarga kerajaan	Pemisahan kekuasaan dengan mekanisme *checks and balances*
Skor kebebasan (Freedom House, 2025)	9 dari 100; *Not Free*	56 dari 100; *Partly Free*

Indeks demokrasi (EIU, edisi 2024)	2,08; rezim otoriter	6,44; demokrasi cacat (*flawed democracy*)

Secara agregat, Arab Saudi tergolong berpendapatan tinggi dengan PDB per kapita sekitar US$35.100 pada 2024 dan IPM 0,900 (peringkat 37, kategori sangat tinggi). Indonesia tergolong berpendapatan menengah-atas dengan PDB per kapita sekitar US$4.900 dan IPM 0,728 (peringkat 113, kategori tinggi) (Programme, 2025; Bank, 2026). Namun, selisih ini tidak dapat langsung dibaca sebagai keunggulan sistem politik karena sumbernya sangat berbeda. Pendapatan Arab Saudi berasal terutama dari rente hidrokarbon: pada 2015 sekitar 72% pendapatan negara berasal dari minyak, dan ketergantungan itu menyebabkan defisit sebesar 367 miliar riyal (Dzarivauri, 2023). Ekonomi Indonesia lebih beragam: menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2026), tiga sektor terbesar dalam struktur PDB adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian, masing-masing sekitar 19%, 13%, dan 13%, diikuti konstruksi dan pertambangan.

Sebagai respons, *Saudi Vision 2030* menetapkan target awal (2016) antara lain menurunkan pengangguran dari 11,6% menjadi 7%, menaikkan kontribusi UKM terhadap PDB dari 20% menjadi 35%, dan menaikkan kontribusi sektor swasta dari 40% menjadi 65% PDB pada 2030 (Kingdom of Saudi Arabia, 2016). Capaian terbarunya beragam. Laporan tahunan Vision 2030 untuk 2025 mencatat kontribusi sektor swasta sebesar 51% dari PDB dan kontribusi UKM sebesar 22,9% (Arab News, 2026), sedangkan pengangguran warga Saudi turun menjadi 7,2% pada kuartal IV 2025 (Arab News, 2026). Dengan demikian, angka pengangguran sudah berada di sekitar target 7%, tetapi kontribusi sektor swasta dan UKM masih jauh dari sasaran 2030. Perlu dicatat bahwa pada awal 2026 pemerintah Saudi mengevaluasi ulang Vision 2030 dengan membatalkan atau menurunkan skala sejumlah proyek raksasa, dan konflik regional sejak akhir Februari 2026 menambah ketidakpastian pelaksanaannya (Szalai, 2026) sehingga capaian di atas adalah data hingga 2025. Pada 2025, menurut estimasi awal GASTAT, ekonomi Arab Saudi tumbuh 4,5%, dengan sektor minyak tumbuh 5,6% dan sektor nonminyak 4,9% (Arab News, 2026), sedangkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11%, sedikit lebih tinggi daripada 5,03% pada 2024 (BPS, 2026). Tabel 2 menyajikan perbandingan indikator ekonomi dan tata kelola.

Tabel 2. Perbandingan Indikator Ekonomi dan Tata Kelola

Indikator	**Arab Saudi**	**Indonesia**
PDB per kapita 2024 (US$)	Sekitar 35.100 (berpendapatan tinggi)	Sekitar 4.900 (berpendapatan menengah-atas)
Pertumbuhan PDB riil 2025	4,5% (minyak 5,6%; nonminyak 4,9%)	5,11% (BPS, 2026)
Basis ekonomi	Minyak dan gas; rente hidrokarbon mendominasi pendapatan negara (sekitar 72% pada 2015) dan ekspor	Lebih beragam: industri pengolahan (sekitar 19% PDB), perdagangan, pertanian (termasuk sawit), konstruksi, dan pertambangan (termasuk batu bara dan nikel)
Peran negara dalam ekonomi	Dominan melalui Aramco, *Public Investment Fund* (PIF), dan proyek skala besar	Campuran: BUMN, badan pengelola investasi negara (Danantara), dan sektor swasta
IPM 2023 (UNDP, 2025)	0,900; peringkat 37 (sangat tinggi)	0,728; peringkat 113 (tinggi)
Ketimpangan	Data resmi terbatas; distribusi bergantung pada subsidi dan pekerjaan sektor publik bagi warga negara	Ketimpangan tergolong menengah dan dipantau berkala oleh BPS
Persepsi korupsi (CPI 2025)	Skor 57; peringkat 45	Skor 34; peringkat 109

Disiplin fiskal	Mengikuti siklus harga minyak	Dibatasi hukum: defisit maksimal 3% dan utang 60% dari PDB (UU No. 17 Tahun 2003)
Strategi jangka panjang	*Saudi Vision 2030* (2016): diversifikasi ekonomi	Visi Indonesia Emas 2045 dan RPJPN 2025–2045; hilirisasi sumber daya

Dari sudut pandang rasional, konsentrasi kekuasaan memberi penguasa kemampuan menetapkan arah ekonomi tanpa hambatan koalisi atau oposisi, sebagaimana tampak pada peluncuran *Saudi Vision 2030* dan pengerahan *Public Investment Fund* untuk membiayai diversifikasi. Montambault Trudelle, (2023)menunjukkan bahwa perubahan struktur dan tujuan dana investasi negara (PIF) sejak 2015 terutama didorong oleh konsentrasi kekuasaan di lingkar dalam keluarga kerajaan di bawah Muhammad bin Salman: dewannya sebagian besar diisi orang dalam, dan strategi investasi domestiknya bergeser dari pola yang tersebar mengikuti pengaruh elite yang bersaing menjadi terpusat dan dipersonalisasi. Aftab dan Abbasi (2026) menilai bahwa Muhammad bin Salman berhasil mengonsolidasikan kekuasaan, antara lain lewat penetralan rival dan kendali atas institusi koersif dan hukum, sehingga stabilitas jangka pendek hingga menengah terjaga. Dzarivauri, (2023) membaca keputusan reformasi Muhammad bin Salman sebagai pilihan rasional: setelah menimbang kondisi sosial dan ekonomi kerajaan, ia menilai reformasi lebih menguntungkan daripada tidak mereformasi sama sekali. Penguasa juga memiliki horizon kebijakan yang dapat panjang karena tidak terikat siklus elektoral.

Akan tetapi, struktur insentif yang sama menimbulkan beberapa kerentanan. Pertama, karena negara bertumpu pada rente minyak dan bukan pajak, ikatan akuntabilitas dengan warga lemah dan stabilitas politik dijaga melalui distribusi rente (Beblawi & Luciani, 1987; Ross, 2001). Ożarowski, (2022) mencatat bahwa pada masa Raja Salman posisi putra mahkota berpindah dari Muqrin ke Mohamme d bin Nayef (2015) lalu ke Muhammad bin Salman (2017), disertai penangkapan pangeran dan pengusaha dalam kampanye antikorupsi 2017, yang menurut penulisnya memperkuat posisi Muhammad bin Salman. Kedua, kualitas keputusan sangat bergantung pada preferensi penguasa dan ketiadaan mekanisme koreksi yang independen. Dzarivauri, (2023) mencatat bahwa reformasi sosial-ekonomi berjalan bersamaan dengan watak politik yang tetap otoriter, ditandai pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 dan ketiadaan media independen, sehingga proyek berisiko tinggi dapat berjalan tanpa evaluasi kritis publik. Ketiga, diversifikasi ekonomi menuntut reformasi struktural, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja domestik dan pengurangan subsidi, yang secara politik mengganggu kontrak sosial berbasis rente.

Dalam sistem demokratis, penguasa menghadapi disiplin elektoral dan pengawasan lembaga lain. Konsekuensi positifnya adalah legitimasi kebijakan yang lebih luas, pergantian kepemimpinan yang relatif damai, dan kerangka disiplin makroekonomi yang dikunci undang-undang. Namun, biaya kompromi politik membuat pembuatan kebijakan lebih lambat dan sering menghasilkan keputusan kompromistis. Iskandar et al. (2024) mengidentifikasi hambatan berupa lemahnya koordinasi antarlembaga, korupsi, persaingan politik, ketimpangan sosial, dan kecenderungan sentralisasi kekuasaan.

Bukti dari tingkat provinsi menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dengan pertumbuhan tidak sederhana. Pengaruh aspek lembaga demokrasi cenderung positif (Purba & Hariyadi, 2023; Novanto & Prabowo, 2024), sedangkan pengaruh kebebasan sipil, hak politik, dan indeks demokrasi secara keseluruhan berubah menurut periode dan cara pengukuran (Novanto & Prabowo, 2024; Abdilah & Riyanto, 2025). Abdilah & Riyanto, (2025) mencatat bahwa pada 2015–2019 skor Freedom House Indonesia turun dari 66 ke 61 dan skor EIU dari 7,03 ke 6,48, sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi regional melambat dari 5,71% ke 4,68%. Daya penjelas model yang rendah, misalnya 7,19% pada Purba & Hariyadi, (2023), menegaskan bahwa banyak faktor di luar demokrasi ikut menentukan hasil ekonomi.

Studi tentang demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa kompetisi elektoral berbiaya tinggi dapat membelokkan kebijakan ekonomi serta memelihara korupsi (Aspinall & Mietzner, 2010), kajian atas UU Cipta Kerja mencatat kritik bahwa penyusunannya minim konsultasi publik dan dipengaruhi elite politik-bisnis, meskipun bukti kemunduran demokrasi secara keseluruhan beragam (Mahy, 2022), dan (Asrinaldi et al., 2022)menunjukkan bahwa oligark partai dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo

membantu meloloskan kebijakan yang menguntungkan kepentingan ekonomi dan politik kelompok oligarki. Artinya, keberadaan institusi demokratis belum otomatis menghasilkan institusi ekonomi yang inklusif. Secara teoretis, apabila lembaga pengawas lemah atau elite menguasai akses ekonomi, insentif rasional elite dapat mendorong perburuan rente (Acemoglu & Robinson, 2012); perubahan kedudukan KPK pada 2019 (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ; Mochtar, 2021) memperlihatkan bahwa kewenangan lembaga pengawas dapat berubah mengikuti keputusan politik. Hal ini sejalan dengan Abbas & Manan, (2005) yang menekankan bahwa demokrasi politik baru bermakna bagi ekonomi apabila diiringi kesejajaran sistem ekonomi, serta dengan (Afriati et al., 2025) yang menempatkan korupsi dan inefisiensi birokrasi sebagai pembatas utama manfaat demokrasi.

Perbandingan dua negara tidak dapat mengabaikan faktor di luar sistem pemerintahan. Pertama, kelimpahan minyak memberi Arab Saudi basis fiskal yang tidak dimiliki Indonesia, sehingga kapasitas membiayai kebijakan tidak sepenuhnya mencerminkan keunggulan sistem politik. Kedua, kelimpahan sumber daya tidak otomatis menyejahterakan: (Mas'ud et al., 2022) mengangkat persoalan kemiskinan yang justru tinggi di daerah kaya sumber daya alam Indonesia dan mengaitkannya dengan demokrasi ekonomi yang belum adil serta derajat penghisapan ekonomi yang besar. Ketiga, perbedaan demografi, geografi, dan sejarah: Indonesia adalah negara kepulauan berpenduduk jauh lebih besar dengan tantangan pemerataan antarwilayah, dan pengalaman krisis 1997–1998 membentuk kerangka disiplin fiskal pasca-reformasi. Keempat, perbedaan skor persepsi korupsi menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan kebijakan tidak dapat disimpulkan semata-mata dari label demokrasi atau monarki (Kaufmann et al., 2010).

Hubungan ekonomi kedua negara memperlihatkan bahwa keputusan ekonomi lintas rezim lebih banyak dipandu perhitungan untung-rugi. Salim, (2022) menjelaskan bahwa investasi Saudi di sektor UKM Indonesia pada 2017, yang ditandai sebelas kesepakatan kerja sama, dilatari ketersediaan sumber daya seperti upah tenaga kerja, penguasaan teknologi informasi, dan infrastruktur, serta besar dan terbukanya pasar Indonesia. Ningsih & Nisaa, (2021) mencatat nilai perdagangan kedua negara sebesar US$5,07 miliar pada 2019 dengan defisit di pihak Indonesia sebesar US$2,06 miliar. Kenaikan tarif bea masuk Saudi pada 27 Mei 2020 atas 37 pos tarif, dari kisaran 5–12% menjadi 7–20%, berdampak pada ekspor kertas, besi dan baja, mesin, serta serat stapel buatan, tetapi tidak pada kendaraan, plastik, elektronik, dan minyak sawit. Temuan ini menunjukkan bahwa penguasa monarki memilih mitra dan menetapkan kebijakan berdasarkan kepentingan ekonomi, bukan kesamaan sistem politik.

Tabel 3. Sintesis Kekuatan dan Kelemahan Tiap Sistem dalam Pembangunan Ekonomi

Dimensi	Monarki absolut (Arab Saudi)	Demokrasi (Indonesia)
Kecepatan keputusan	Tinggi; sedikit titik veto	Lebih lambat; membutuhkan konsensus dan koalisi
Akuntabilitas	Rendah; bergantung pada penguasa	Lebih tinggi secara formal, tetapi dilemahkan korupsi dan oligarki
Risiko kebijakan	Keputusan keliru sulit dikoreksi; ketergantungan pada satu komoditas	Kebijakan populis, inkonsistensi antarperiode, dan biaya politik tinggi
Legitimasi dan stabilitas	Bertumpu pada distribusi rente dan kontrol politik	Bertumpu pada pemilu dan partisipasi; transisi kekuasaan relatif teratur
Kapasitas diversifikasi	Terhambat kontrak sosial berbasis rente	Lebih beragam secara struktural, tetapi masih bergantung pada komoditas

Berdasarkan sintesis tersebut, jawaban atas pertanyaan utama penelitian ini adalah bahwa sistem pemerintahan hanya menentukan keberhasilan ekonomi secara parsial. Sistem pemerintahan memengaruhi cara ekonomi dikelola, tetapi perbandingan Arab Saudi dan Indonesia memperlihatkan

bahwa kualitas institusi, rente sumber daya alam, dan insentif elite ikut menentukan hasilnya. Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan tiga proposisi yang dapat diuji pada studi lanjutan. Pertama, sistem pemerintahan memengaruhi *cara* pembangunan ekonomi dikelola (kecepatan, akuntabilitas, dan kesinambungan), tetapi tidak secara tunggal menentukan *hasilnya*. Kedua, rente sumber daya alam melemahkan hubungan akuntabilitas antara negara dan warga, baik di monarki maupun di demokrasi, sehingga kualitas institusi lebih menentukan daripada label rezim. Ketiga, keberhasilan ekonomi jangka panjang lebih mungkin tercapai ketika ada institusi yang membatasi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan insentif elite yang selaras dengan produktivitas (Acemoglu & Robinson, 2012).

Desain dua kasus tidak memungkinkan inferensi kausal yang kuat, dan temuan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh monarki atau demokrasi. Data bersifat sekunder sehingga bergantung pada ketersediaan dan kualitas laporan, termasuk terbatasnya data transparan dari Arab Saudi, khususnya mengenai ketimpangan. Sebagian rujukan tentang Arab Saudi memakai data masa pemerintahan sebelumnya (Nadia, 2020), dan indeks persepsi seperti CPI bersifat persepsional dengan keterbatasan metodologis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan bukan penentu tunggal keberhasilan ekonomi, dengan tiga temuan utama. Pertama, monarki absolut Arab Saudi menawarkan kecepatan dan konsistensi keputusan ekonomi, tetapi bertumpu pada rente minyak dengan akuntabilitas yang lemah. Kedua, demokrasi Indonesia menghasilkan legitimasi dan kerangka stabilitas makroekonomi, tetapi menghadapi hambatan berupa biaya kompromi politik, korupsi, dan kepentingan oligarkis. Ketiga, sistem pemerintahan membentuk kondisi dan insentif dalam pengelolaan ekonomi, tetapi tidak menentukan keberhasilannya secara tunggal; kualitas institusi, struktur insentif elite, dan karakter sumber daya alam sama pentingnya.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menambah negara pembanding, memakai data kuantitatif runtut waktu, dan menguji proposisi pada bagian “Apakah Sistem Pemerintahan Menentukan Keberhasilan Ekonomi?” dengan metode campuran. Bagi pembuat kebijakan Indonesia, memperkuat institusi pengawas dan transparansi diperlukan agar manfaat demokrasi terwujud dalam kualitas kebijakan ekonomi, disertai pengelolaan sumber daya alam yang menghindari jebakan rente. Bagi pembaca dan akademisi, penyederhanaan bahwa satu jenis sistem pemerintahan pasti lebih unggul secara ekonomi perlu dihindari tanpa mempertimbangkan konteks dan kualitas institusinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, T., & Manan, W. K. (2005). Keterkaitan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan. Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 21(3), 430–440.

Abdilah, R., & Riyanto. (2025). Analisis pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia tahun 2015–2023. Jurnal Transformative, 11(2), 170–196. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2025.011.02.3

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business.

Afriati, D., Permana, R. H., & Malik, A. (2025). Analisis peran demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Analisis literatur dan dokumen kebijakan. Indonesian Journal of Public Administration Review, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.47134/par.v3i1.5094

Aftab, A., & Abbasi, M. U. (2026). Crown prince to virtual ruler: Consolidation of power by Muhammad bin Salman in Saudi Arabia. Digest of Middle East Studies, 35(3). https://doi.org/10.1111/dome.70033

Al Naimi, S. M. (2022). Economic diversification trends in the Gulf: The case of Saudi Arabia. Circular Economy and Sustainability, 2(1), 221–230. https://doi.org/10.1007/s43615-021-00106-0

Arabia, K. of S. (2016). Saudi Vision 2030.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (Editors). (2010). Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society. Institute of Southeast Asian Studies.

Asrinaldi, Yusoff, M. A., & Karim, Z. A. (2022). Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia. Asian Journal of Comparative Politics, 7(2), 189–203. https://doi.org/10.1177/2057891121995564

Azwar, A., & Subekan, A. (2022). Does democracy reduce corruption in Indonesia? Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 25(3), 195–208. https://doi.org/10.22146/jsp.56886

Bank, W. (2026). GDP per Capita (Current US$). In World Development Indicators. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

Basic Law of Governance (1992).

Beblawi, H., & Luciani, G. (Editors). (1987). The rentier state. Croom Helm.

Ben Hassen, T. (2022). The GCC economies in the wake of COVID-19: Toward post-oil sustainable knowledge-based economies? Sustainability, 14(18), 11251. https://doi.org/10.3390/su141811251

Berg-Schlosser, D., & Hoffmann-Lange, U. (2023). Comparing regime types – 'most similar' cases in East Asia. Asian Journal of Comparative Politics, 8(4), 865–894. https://doi.org/10.1177/20578911231164767

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Dzarivauri, R. (2023). Reformasi kebijakan Arab Saudi: Vision 2030 dan implikasinya pada sektor perekonomian. Jurnal Analisis Sosial Politik, 7(1), 25–35. https://doi.org/10.23960/jasp.v7i1.99

Gerring, J., Bond, P., Barndt, W. T., & Moreno, C. (2005). Democracy and economic growth: A historical perspective. World Politics, 57(3), 323–364.

Gerring, J., Knutsen, C. H., & Berge, J. (2022). Does democracy matter? Annual Review of Political Science, 25, 357–375. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-060820-060910

Hernández Martínez, D. (2020). Structure and distribution of power in Saudi Arabia: Main actors, institutions and decision-making process. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 7(1), 15–25. https://doi.org/10.5209/cgap.65525

Hertog, S. (2010). Princes, brokers, and bureaucrats: Oil and the state in Saudi Arabia. Cornell University Press.

Hikmah, N. (2013). Hubungan antara demokrasi dengan pembangunan ekonomi. Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan (JISPAR), 2(2), 44–55. https://doi.org/10.37304/jispar.v2i2.359

House, F. (2025). Freedom in the World 2025. Freedom House.

Iskandar, M. M. Y., Tarmudi, Dear, Sugianto, & Nuraeni, N. (2024). Pengaruh sistem tata negara terhadap stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, 1(2), 94–106.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. World Bank.

Krieger, T. (2022). Democracy and the quality of economic institutions: Theory and evidence. Public Choice, 192(3), 357–376. https://doi.org/10.1007/s11127-022-00990-6

Kusuma, D. P., Dewi, K. P., & Atmika, G. S. (2025). Nickel diplomacy: The geopolitics of Indonesia's downstream policy and the global electric vehicle supply chain. Indonesia Discourse, 2(2), 215–240. https://doi.org/10.15294/indi.v2i2.43038

Lijphart, A. (1971). Comparative politics and the comparative method. American Political Science Review, 65(3), 682–693.

Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. American Political Science Review, 53(1), 69–105.

Mahdavy, H. (1970). The patterns and problems of economic development in rentier states: The case of Iran. In M. A. Cook (Ed.), Studies in the economic history of the Middle East (pp. 428–467). Oxford University Press.

Mahy, P. (2022). Indonesia's omnibus law on job creation: Legal hierarchy and responses to judicial review in the labour cluster of amendments. Asian Journal of Comparative Law, 17(1), 51–75. https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7

Mas'ud, R., Wijaya, A., & Suharto, R. B. (2022). Pengaruh demokrasi ekonomi dan.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128

Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jurnal Konstitusi, 18(2), 321–344. https://doi.org/10.31078/jk1823

Montambault Trudelle, A. (2023). The Public Investment Fund and Salman's State: The Political Drivers of Sovereign Wealth Management in Saudi Arabia. Review of International Political Economy, 30(2), 747–771. https://doi.org/10.1080/09692290.2022.2069143

Muhyiddin, M. (2026). IMIP Morowali as a National Strategic Project: The Political Economy of Nickel Downstream Industrialization in Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 10(2), 142–158. https://doi.org/10.36574/jpp.v10i2.864

Mulligan, C. B., Gil, R., & Sala-i-Martin, X. (2004). Do democracies have different public policies than nondemocracies? Journal of Economic Perspectives, 18(1), 51–74.

Mustun, Z. K. (2022). Sustainable Development, Climate Change Vulnerability, Governance and Oil Rent: The Case of Saudi Arabia. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 10(3), 35–62. https://doi.org/10.24191/jeeir.v10i3.19094

Nadia. (2020). Sistem pemerintahan dan kebijakan luar negeri Arab Saudi. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 161–175.

Neffati, M., & Jbir, R. (2024). The Impact of Digitalization and Economic Diversification on Economic Growth: Evidence from Saudi Arabia. Technological and Economic Development of Economy, 30(5), 1510–1532. https://doi.org/10.3846/tede.2024.22105

News, A. (2026). Saudi Annual Vision 2030 Report Shows Most Indicators Achieve Targets. https://www.arabnews.com/business/saudi-annual-vision-2030-report-shows-most-indicators-achieve-targets-2641250

Ningsih, R., & Nisaa, C. (2021). Analisis kebijakan pemerintah Arab Saudi menaikan tarif bea masuk dan implikasinya terhadap ekspor Indonesia. Cendekia Niaga, 5(1), 17–33.

Novanto, F. S. P., & Prabowo, P. S. (2024). Pengaruh perkembangan demokrasi dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. INDEPENDENT: Journal of Economics, 4(1), 41–53.

Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 334–354.

Ożarowski, R. (2022). Mohammed bin Salman's Rising to Power: Chances for Transition in Saudi Arabia? Przegląd Strategiczny, (15), 157–168. https://doi.org/10.14746/ps.2022.1.10

Paldam, M. (2024). Income, Growth, and Democracy: Looking for the Main Causal Directions in the Nexus. European Journal of Political Economy, 83, 102532. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102532

Power, T. P. (2018). Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54(3), 307–338.

Programme, U. N. D. (2025). Human Development Report 2025. UNDP.

Przeworski, A., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A., & Limongi, F. (2000). Democracy and development: Political institutions and well-being in the world, 1950–1990. Cambridge University Press.

Purba, S. F., & Hariyadi, H. (2023). Relasi bauran aspek demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, 14(2), 165–188. https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.165-188

Ross, M. L. (2001). Does Oil Hinder Democracy? World Politics, 53(3), 325–361.

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). Natural Resource Abundance and Economic Growth. In NBER Working Paper. National Bureau of Economic Research.

Salim, C. (2022). Alasan Arab Saudi berinvestasi di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia tahun 2017. EJournal Ilmu Hubungan Internasional, 10(2), 644–653.

Statistik, B. P. (2026). Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen. https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Szalai, M. (2026). Vision 2030 Under Pressure: The Saudi Economy Amidst War, Competition and Reassessment. In Policy Brief. Clingendael Institute. https://www.clingendael.org/sites/default/files/2026-04/PB_Vision_2030_under_pressure.pdf

Trinugroho, I., Achsanta, A. F., Pamungkas, P., Saputro, N., & Yuniarti, S. (2023). Democracy, Economic Growth, and Income Inequality: Evidence from Province Level Data. Cogent Economics & Finance, 11(1), 2220244. https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220244

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2019).

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (2024).

Unit, E. I. (2025). Democracy Index 2024: What's Wrong with Representative Democracy? Economist Intelligence Unit.

Walker, S. (2023). Rentier State Theory 50 Years On: New Developments. Frontiers in Political Science, 5, 1120439. https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1120439

Yunan, Z. Y., Freyens, B., & Vidyattama, Y. (2025). Corruption and Indonesia's Regional Economic Performance. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 61(2), 205–227. https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2437826